

Moderasi Beragama Din Syamsuddin terhadap Resolusi Konflik Maluku 1999–2002

Dewi Arofah

UIN Sunan Ampel Surabaya
dewiiarofah12@gmail.com

Achmad Zuhdi Dh

UIN Sunan Ampel Surabaya
achmadzuhdi@uinsa.ac.id

Abstrak: Konflik sektarian Maluku 1999–2002 menjadi salah satu peristiwa paling kompleks dalam sejarah sosial-politik Indonesia pasca-Reformasi, menyingkap rapuhnya kohesi sosial di tengah masyarakat plural. Konflik ini dipicu oleh akumulasi ketimpangan sosial-ekonomi, persaingan birokrasi lokal, dan polarisasi identitas agama yang dipolitisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang konflik, eskalasinya, serta peran moderasi beragama dalam proses rekonsiliasi. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah berbasis studi pustaka, meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan arsip berita, dengan tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama berperan krusial dalam mengubah relasi antarumat beragama dari permusuhan menjadi kerja sama. Perjanjian Malino II, inisiatif tokoh agama, serta program pendidikan dan bantuan kemanusiaan lintas komunitas terbukti efektif memulihkan kepercayaan, dan menanamkan nilai pluralisme. Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif, melainkan strategi historis yang mampu membangun perdamaian dan kohesi sosial jangka panjang, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi penyelesaian konflik komunal di Indonesia.

Kata Kunci: *Konflik Maluku, Moderasi, Sejarah.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, baik dari segi etnis, budaya, bahasa, maupun agama. Kemajemukan ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan yang tidak terelakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terbesar dalam sejarah sosial-politik Indonesia adalah terjadinya konflik bernuansa keagamaan yang menimbulkan disintegrasi sosial, sebagaimana yang tercermin dalam konflik sektarian di Maluku pada tahun 1999 (Bertrand, 2003).

Peristiwa tersebut menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terburuk pasca-Reformasi yang menelan ribuan korban jiwa, menghancurkan struktur sosial masyarakat, dan meninggalkan trauma kolektif yang panjang (International Crisis Group, 2000). Gesekan yang awalnya bersifat sosial-ekonomi kemudian berkembang menjadi konflik komunal yang kompleks, diperparah oleh faktor politik, perebutan

sumber daya, serta lemahnya kontrol negara terhadap dinamika keamanan lokal. Identitas agama menjadi simbol sekaligus instrumen mobilisasi, sehingga memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.

Konflik Maluku tidak hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia kontemporer, tetapi juga refleksi tentang rapuhnya kohesi sosial di tengah pluralitas. Sejak 2002, sejumlah upaya rekonsiliasi dilakukan, salah satunya melalui Perjanjian Malino II yang menjadi momentum penting bagi perdamaian. Seiring waktu, inisiatif masyarakat sipil dan tokoh agama mengembangkan berbagai strategi dialog, pendidikan, dan program lintas iman yang didasarkan pada semangat moderasi beragama (Al Qurtuby, 2013).

Moderasi beragama di sini tidak dipahami semata-mata sebagai konsep normatif, melainkan sebagai praktik historis yang nyata dalam merawat perdamaian. Pendekatan ini terbukti memainkan peran strategis dalam meredam kekerasan, membangun kembali kepercayaan, dan mengubah pola relasi sosial antarumat beragama dari kecurigaan menuju kerja sama konstruktif (International Crisis Group, 2002).

Meskipun banyak penelitian telah membahas konflik Maluku, sebagian besar kajian berfokus pada faktor politik, keamanan, dan ekonomi. Jacques Bertrand (2003) menekankan aspek politik identitas, Chris Wilson (2008) melihat konflik dari sudut mobilisasi etnis dan agama, sementara beberapa studi lokal menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi sebagai pemicu.

Akan tetapi, studi-studi tersebut cenderung berhenti pada analisis sebab-akibat konflik tanpa memberi perhatian serius pada bagaimana moderasi beragama berperan dalam proses rekonsiliasi jangka panjang. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dijawab, yaitu kajian historis yang menempatkan moderasi beragama bukan hanya sebagai wacana normatif, melainkan sebagai faktor historis dalam membangun perdamaian pascakonflik.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga fokus utama, yaitu bagaimana latar belakang konflik sektarian Maluku 1999, bagaimana perjalanan konflik tersebut dalam rentang 1999 hingga 2022, serta bagaimana moderasi beragama berperan dalam proses penyelesaian dan rekonsiliasi. Tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan rekonstruksi historis mengenai dinamika konflik Maluku, menjelaskan kronologi dan perubahan yang terjadi sepanjang periode tersebut, serta menganalisis peran konkret moderasi beragama dalam mengembalikan harmoni sosial di Maluku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical method*) yang meliputi empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005). Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta arsip berita kontemporer yang mendokumentasikan jalannya konflik. Sumber-sumber tersebut kemudian diuji melalui kritik eksternal dan internal guna menilai otentisitas, validitas, serta reliabilitas data. Selanjutnya, proses interpretasi dilakukan dengan menempatkan data dalam konteks sosial, politik, dan

keagamaan yang melingkupi konflik Maluku. Tahap akhir berupa historiografi bertujuan menyusun narasi sejarah yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis. Dengan pendekatan studi pustaka yang kritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah historiografi konflik komunal di Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana moderasi beragama dalam praksis penyelesaian konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Maluku 1999 merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah sosial-politik Indonesia pasca-Reformasi. Tragedi ini tidak hanya mengungkap rapuhnya kohesi sosial di tengah masyarakat yang plural, tetapi juga memperlihatkan bagaimana faktor politik, ekonomi, dan identitas keagamaan dapat berkelindan dalam menciptakan kekerasan komunal.

Konflik Maluku 1999 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai benturan antaragama, melainkan sebagai peristiwa multidimensional yang dipicu oleh kompleksitas faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Peristiwa ini menegaskan bahwa keragaman yang tidak diimbangi dengan pengelolaan politik yang adil serta kesadaran kebangsaan yang kuat berpotensi menjadi sumber disintegrasi. Di sisi lain, pengalaman historis Maluku juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan militer atau politik formal, melainkan harus menempatkan nilai-nilai moderasi beragama sebagai fondasi rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang (Tadjoeddin, 2002).

Latar Belakang Konflik Sektarian Maluku 1999

Sebelum pecahnya konflik pada Januari 1999, Maluku kerap dipandang sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di Indonesia. Harmoni itu terwujud melalui kearifan lokal *pela gandong*, yaitu ikatan persaudaraan antar-negeri (desa adat) yang melampaui perbedaan agama. Ikatan ini memungkinkan keluarga Muslim menghadiri perayaan Natal kerabat Kristennya, begitu pula keluarga Kristen yang membantu persiapan Idulfitri. Pada pesta rakyat seperti *cuci negeri* atau *panas pela*, umat Islam dan Kristen duduk bersama tanpa sekat identitas. Bahkan, dalam pemerintahan lokal, jabatan penting sering dibagi dengan pola seimbang—misalnya camat Muslim, wakilnya Kristen, atau sebaliknya—sebagai wujud representasi yang adil (International Crisis Group, 2000).

Namun, sejak awal Reformasi, keretakan mulai terasa. Kebijakan otonomi daerah yang membuka peluang perebutan jabatan strategis justru menimbulkan kecurigaan antaragama. Misalnya, dalam perekrutan PNS atau penempatan pejabat lokal, muncul tudingan adanya dominasi kelompok tertentu berdasarkan afiliasi agama. Ketimpangan sosial-ekonomi juga memperuncing kondisi: komunitas Kristen yang umumnya lebih dulu terakses pendidikan dan birokrasi dianggap lebih dominan dalam struktur pemerintahan, sementara kelompok Muslim yang jumlahnya lebih besar merasa

termarginalkan. Ketidakpuasan itu menumpuk di tengah lemahnya aparat keamanan yang belum siap menghadapi perubahan sosial-politik yang cepat (Usman, 2016).

Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada 19 Januari 1999. Insiden yang sebenarnya sederhana—perkelahian antara seorang sopir angkutan Muslim dari Bugis dengan pemuda Kristen di terminal Batu Merah, Ambon—seketika melebar menjadi kerusuhan massal. Api konflik dengan cepat membakar rumah, gereja, dan masjid di sekitar lokasi. Isu-isu provokatif seperti “umat Islam diserang” atau “umat Kristen dibantai” menyebar dari mulut ke mulut, diperkuat dengan selebaran gelap dan kabar radio komunitas. Dalam hitungan hari, Ambon terbagi dalam wilayah homogen: kawasan Islam dan kawasan Kristen, dipisahkan oleh “garis merah” yang dijaga kelompok bersenjata tradisional seperti parang, tombak, hingga senjata api rakitan (Usman, 2016).

Peristiwa ini tak berhenti di Ambon. Desa-desa di Pulau Seram, Halmahera, dan Maluku Tengah ikut terseret. Banyak kasus pembakaran rumah ibadah menjadi simbol bahwa konflik bukan sekadar soal perkelahian individu, tetapi sudah berubah menjadi perang identitas. Misalnya, di desa-desa sekitar Masohi, masjid dan gereja silih berganti menjadi target pembakaran, memaksa warga mengungsi ke wilayah yang seagama. Ribuan pengungsi memadati pos-pos darurat di kantor pemerintahan, sekolah, hingga markas militer. Data mencatat lebih dari sepuluh ribu orang kehilangan rumahnya sepanjang konflik berlangsung (Gumilang, 2019).

Dengan demikian, konflik Maluku tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan akumulasi dari ketidakadilan struktural, kecemburuan sosial, dan lemahnya pranata adat *pela gandong* dalam menghadapi arus perubahan. Identitas agama yang sebelumnya menjadi perekat justru dipolitisasi sehingga menjadi garis demarkasi tajam. Perkelahian kecil di Batu Merah hanyalah percikan awal yang menyulut “bom waktu” ketegangan laten di Maluku.

Eskalasi Konflik Sektarian Maluku 1999-2002

Setelah pecah pada awal 1999, konflik Maluku berkembang menjadi salah satu tragedi komunal terbesar di Indonesia pasca-Reformasi. Bentrokan yang semula bersifat lokal di Ambon segera menyebar ke wilayah lain, menelan korban jiwa dalam skala besar. Dalam kurun 1999–2002, berbagai laporan menyebutkan lebih dari 5.000 orang meninggal dunia, puluhan ribu rumah hancur, dan ratusan ribu warga mengungsi. Kota Ambon sendiri berubah menjadi ruang segregasi dengan “garis batas” yang memisahkan kawasan Islam di Batu Merah, Galunggung, hingga Waihaong, dan kawasan Kristen di Mardika, Kudamati, serta Passo (George, 2017).

Di lapangan, eskalasi konflik ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok milisi yang terorganisasi. Pada pihak Kristen, terbentuk milisi Coker (Cowok Keren) dan kelompok Pasukan Cakra, sementara pada pihak Muslim muncul Laskar Jihad yang didatangkan dari Jawa atas nama solidaritas agama. Kehadiran Laskar Jihad pada pertengahan 2000 memperbesar intensitas konflik. Mereka membawa semangat jihad melawan Kristen, lengkap dengan seruan-seruan keagamaan yang dikumandangkan di masjid-masjid, serta persenjataan yang lebih modern dibandingkan masyarakat lokal. Di

sisi lain, kelompok milisi Kristen juga memobilisasi massa dengan narasi “perang salib lokal”, memperkuat retorika pertahanan diri dari ancaman eksistensial (Hasan, 2006).

Kehidupan sehari-hari masyarakat pun terbelah. Anak-anak tidak lagi bisa bersekolah karena sekolah-sekolah di perbatasan ikut terbakar. Aktivitas ekonomi lumpuh; pasar Mardika, yang dulu menjadi pusat perdagangan utama Ambon dan mempertemukan pedagang Muslim-Kristen, hancur total. Perjalanan antar wilayah menjadi berisiko karena setiap orang yang melewati garis demarkasi dapat dituduh “musuh” dan diserang. Laporan media lokal kala itu menggambarkan kondisi Ambon layaknya kota mati dengan suara tembakan dan ledakan granat rakitan hampir setiap hari.

Eskalasi juga diperparah oleh ketidakmampuan dan ketidaknetralan aparat keamanan. TNI dan Polri, yang baru saja menjalani proses pemisahan institusi pasca-Reformasi, sering dituding memihak salah satu kelompok. Banyak kesaksian menyebutkan adanya anggota aparat yang terlibat langsung dalam pertempuran atau memfasilitasi distribusi senjata. Misalnya, dalam kerusuhan di Halmahera Utara, ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat dalam penyerangan desa-desa Muslim, sementara di Ambon, ada laporan aparat membiarkan serangan terhadap perkampungan Kristen berlangsung tanpa intervensi. Hal ini semakin mengikis kepercayaan publik terhadap negara sebagai mediator (International Crisis Group, 2000).

Tragedi kemanusiaan mencapai puncaknya pada 2000–2001, ketika pola serangan menjadi lebih sistematis. Desa-desa yang sebelumnya dihuni secara campuran dipaksa homogen; umat Islam dipaksa pindah ke desa mayoritas Muslim, demikian pula sebaliknya. Ikatan persaudaraan adat yang selama ratusan tahun menjadi fondasi integrasi sosial kini praktis lumpuh, digantikan oleh narasi kebencian berbasis agama.

Namun, di tengah gelombang kekerasan, terdapat pula upaya damai dari akar rumput. Beberapa tokoh agama Islam dan Kristen tetap menjalin komunikasi diam-diam, berusaha mencegah meluasnya kekerasan. Misalnya, inisiatif dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja di Soya dengan imam masjid dari Waihaong menjadi cikal bakal forum perdamaian lokal. Sayangnya, inisiatif ini sering terhambat oleh kelompok garis keras yang menolak kompromi (Al Qurtuby, 2013).

1999–2002 menandai fase paling gelap dalam sejarah Maluku modern. Konflik tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan otoritas negara, dan menghapus warisan kearifan lokal. Dari sinilah kemudian lahir kebutuhan mendesak akan strategi penyelesaian berbasis moderasi beragama, yang pada tahap selanjutnya menjadi instrumen penting dalam proses rekonsiliasi Maluku.

No	Tahun	Peristiwa	Tempat
1	Januari 1999	Bentrokan awal antara sopir Muslim dan pemuda Kristen	Ambon, Batu Merah
2	Februari –	Kekerasan meluas, rumah	Ambon, Mardika,

	Mei 1999	dan gereja/musholla dibakar	Passo, Galunggung
3	Juni – Desember 1999	Mobilisasi milisi lokal dan eksternal	Ambon, Maluku Tengah, Seram
4	2000	Intensifikasi konflik dan segregasi wilayah	Ambon dan pulau-pulau sekitar
5	2001	Perluasan konflik ke desa-desa terpencil	Seram, Halmahera, Masoh
6	Februari 2002	Perjanjian Malino II	Malino, Sulawesi Selatan

Tabel 1: Eskalasi Konflik Sektarian Maluku 1999-2002.

Moderasi Beragama pada Penyelesaian Konflik Sektarian Maluku

Din Syamsuddin menempatkan moderasi beragama (wasathiyah) sebagai inti ajaran Islam yang menegaskan keseimbangan antara keimanan dan kemanusiaan. Dalam pandangannya, moderasi bukanlah bentuk kompromi terhadap nilai-nilai agama, melainkan ekspresi keutuhan ajaran Islam yang menolak ekstremisme dan kekerasan. Pemikiran Din Syamsuddin menekankan pentingnya keseimbangan (tawazun) dalam berpikir dan bertindak agar umat Islam mampu menghadirkan agama sebagai sumber perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Ia menegaskan bahwa moderasi harus diwujudkan dalam praktik sosial, politik, dan kebudayaan melalui dialog lintas iman, penghormatan terhadap pluralitas, serta penguatan nilai-nilai moral publik. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini memiliki relevansi besar karena menjadi dasar dalam membangun harmoni antarumat beragama dan mencegah munculnya radikalisme. Sebagaimana dijelaskan oleh M. A. Najib (Najib & Fata, 2020) dalam artikelnya Islam Wasathiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme, konsep wasathiyah yang dikembangkan Din Syamsuddin berangkat dari prinsip Islam sebagai ummatan wasathan—umat pertengahan—yang menolak segala bentuk ghuluw (berlebih-lebihan) dan tanaththu‘ (kekakuan beragama). Oleh karena itu, moderasi beragama bagi Din tidak sekadar sikap tengah-tengah secara politik, melainkan orientasi moral dan epistemologis yang berakar pada nilai-nilai tauhid dan berimplikasi langsung pada pembangunan masyarakat yang adil, toleran, dan berkeadaban.

Upaya mengakhiri konflik Maluku tidak dapat dilepaskan dari peran penting moderasi beragama yang muncul baik dari aktor lokal maupun nasional. Setelah hampir tiga tahun kekerasan berlangsung tanpa kendali, negara akhirnya memfasilitasi pertemuan damai melalui Perjanjian Malino II pada Februari 2002. Pertemuan ini mempertemukan 35 tokoh Muslim dan 35 tokoh Kristen dari Maluku, dengan difasilitasi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Jusuf Kalla (Verelladevanka et al., 2021).

Moderasi beragama menjadi roh utama dari perjanjian ini. Prinsipnya, kedua belah pihak sepakat bahwa identitas agama tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan (Junaedi, 2019). Salah satu butir penting Malino II adalah penghentian segera semua bentuk permusuhan, pemulangan pengungsi ke kampung halaman, serta pemulihan fungsi rumah ibadah yang telah rusak. Butir ini tidak hanya bermakna politis, tetapi juga religius, karena menyentuh aspek paling sensitif dalam konflik, yakni kehormatan agama masing-masing (Al Qurtuby, 2013).

Di tingkat lokal, tokoh-tokoh agama memainkan peran krusial dalam menghidupkan kembali tradisi *pela gandong*. Para pendeta dan imam secara terbuka menyerukan bahwa *pela* bukan sekadar adat, melainkan juga bagian dari panggilan moral agama untuk menjaga perdamaian. Misalnya, di Negeri Tulehu (Muslim) dan Negeri Waai (Kristen), masyarakat melakukan ritual *panas pela* sebagai simbol rekonsiliasi. Ritual ini disertai doa bersama lintas agama, menegaskan kembali bahwa hubungan persaudaraan adat lebih kuat daripada sekat identitas agama yang sempat dipolitisasi (Al Qurtuby, 2013).

Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan juga mendorong moderasi beragama sebagai fondasi rekonsiliasi. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, misalnya, mengirim relawan kemanusiaan untuk membantu pengungsi tanpa memandang agama. Dari sisi Kristen, PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) berperan aktif dalam program dialog lintas iman dan bantuan sosial lintas komunitas. Kehadiran lembaga-lembaga ini membangun kepercayaan bahwa agama dapat kembali menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan (International Crisis Group, 2002).

Dampak dari upaya moderasi beragama terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat pasca-2002. Sekolah-sekolah mulai menerima murid dari kedua komunitas, meski masih ada wilayah segregasi yang sulit dipulihkan. Pasar-pasar tradisional kembali dibuka dengan partisipasi pedagang Muslim dan Kristen. Bahkan, turnamen olahraga lokal dijadikan sarana membangun keakraban lintas identitas, sebagaimana pertandingan sepak bola antara pemuda Tulehu dan Passo yang digagas sebagai simbol perdamaian.

Namun, proses moderasi beragama bukan tanpa tantangan. Sisa-sisa trauma dan segregasi masih terasa hingga kini, terutama di generasi muda yang besar dalam suasana konflik. Karena itu, berbagai inisiatif terus digalakkan untuk menanamkan nilai toleransi dan rekonsiliasi. Program pendidikan perdamaian di sekolah-sekolah Maluku, misalnya, menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan mencegah kekerasan. Hal ini menjadi bukti bahwa moderasi beragama bukan sekadar strategi politik jangka pendek, tetapi fondasi jangka panjang bagi kohesi sosial Maluku (International Crisis Group, 2002).

Dengan demikian, moderasi beragama menjadi kunci transformasi Maluku dari arena konflik berdarah menuju ruang dialog dan rekonsiliasi. Ia menghidupkan kembali kearifan lokal *pela gandong*, mempertemukan kembali umat yang terbelah, dan membuka jalan bagi stabilitas sosial-politik yang lebih kokoh (Junaedi, 2019). Sejarah

Maluku membuktikan bahwa ketika agama dipahami secara inklusif dan humanis, ia tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan motor penggerak perdamaian.

KESIMPULAN

Moderasi beragama terbukti menjadi instrumen krusial dalam menyelesaikan konflik sektarian Maluku 1999–2002 karena mampu mengubah dinamika hubungan antarumat beragama dari saling curiga dan permusuhan menjadi kerja sama dan rekonsiliasi; melalui Perjanjian Malino II, tokoh agama lintas iman menegaskan bahwa identitas agama tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekerasan, sementara inisiatif lokal seperti ritual *pela gandong*, doa bersama, dan program pendidikan perdamaian memperkuat fondasi sosial bagi toleransi. Peran lembaga keagamaan dan masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, NU, dan PGI, dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan lintas agama sekaligus membangun dialog komunitas, memperlihatkan bahwa praktik moderasi beragama bukan hanya wacana normatif, tetapi strategi historis yang efektif dalam memulihkan kepercayaan, menjaga kohesi sosial, dan menanamkan nilai pluralisme. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi kunci rekonsiliasi jangka panjang, mengembalikan harmoni di Maluku, dan memberikan pelajaran penting bagi penyelesaian konflik komunal berbasis pluralitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, S. (2013). Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 24(3), 349–367. <https://doi.org/10.1080/09596410.2013.785091>
- Bertrand, J. (2003). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511559341>
- George, C. (2017). *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi* (I. Ali-Fauzi & I. Rafsadie (eds.); 1st ed.). Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina. <https://www.paramadina-pusad.or.id/buku/pelintiran-kebencian-rekayasa-ketersinggungan-agama-dan-ancamannya-bagi-demokrasi/>
- Gumilang, M. A. (2019). *Kekerasan Komunal dan Strategi Penanganannya*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/kekerasan-komunal-dan-strategi-penanganannya/>
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Cornell University Press.
- International Crisis Group. (2000). *Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku*. <https://www.crisisgroup.org/asia-pacific/indonesia/010-indonesia-overcoming-murder-and-chaos-maluku>
- International Crisis Group. (2002). *INDONESIA: THE SEARCH FOR PEACE IN MALUKU*. https://www.crisisgroup.org/asia-pacific/indonesia/031-indonesia-search-peace-maluku?utm_medium=social&utm_source=twitter

- Junaedi, E. (2019). INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENAG. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. BENTANG.
- Najib, M. A., & Fata, A. K. (2020). Islam Wasatiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal Theologia*, 31(1), 115–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>
- Tadjoeddin, M. Z. (2002). *Anatomy of Social Violence in the Context of Transition: The Case of Indonesia 1990-2001*. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=767344
- Usman. (2016). The Bloodshed in North Halmahera: Roots, Escalation, and Reconciliation. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 6(2).
- Verelladevanka, Adryamarthanino, & Nailufar, N. N. (2021). *Deklarasi Malino: Latar Belakang, Isi, dan Dampak*. KOMPAS. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/31/133000379/deklarasi-malino-latar-belakang-isi-dan-dampak>
- Wilson, C. (2008). *Ethno-Religious Violence in Indonesia*. Routledge: Contemporary Southeast Asia Series.